

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

Bab ini menyajikan simpulan atas seluruh temuan penelitian yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, serta saran yang dirumuskan berdasarkan implikasi penelitian tersebut. Simpulan disusun untuk menjawab rumusan masalah penelitian secara ringkas dan komprehensif, yaitu bagaimana karakteristik dan sentimen pemberitaan isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati pada media online Kompas.com. Saran disampaikan kepada tiga pihak yang relevan: redaksi Kompas.com dan praktisi media, Pemerintah Kabupaten Pati, serta peneliti selanjutnya.

#### **4.1 Simpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan karakteristik dan sentimen pemberitaan isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati pada media online Kompas.com. Berdasarkan analisis isi kuantitatif deskriptif terhadap 44 artikel yang dipublikasikan pada periode Agustus hingga Desember 2025, diperoleh gambaran empiris yang mencakup empat variabel, yaitu sentimen pemberitaan, intensitas pemberitaan, kategori isu, dan komposisi narasumber. Keempat variabel tersebut secara bersama-sama membentuk satu pola pemberitaan yang konsisten, koheren, dan saling memperkuat. Berdasarkan analisis tersebut, simpulan penelitian diuraikan sebagai berikut.

Pertama, dari sisi sentimen pemberitaan, Kompas.com secara konsisten memproduksi berita dengan dominasi sentimen negatif. Lebih dari separuh bahkan mendekati dua pertiga dari keseluruhan artikel dikonstruksi dengan tonalitas yang bersifat negatif, sementara sentimen netral mengisi sebagian kecil berikutnya, dan sentimen positif hampir tidak hadir dalam keseluruhan korpus pemberitaan. Pola dominasi sentimen negatif ini tercermin secara empiris dari penggunaan diksi yang bermuatan kritis, penekanan berulang pada beban sosial-ekonomi masyarakat akibat kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) hingga 250 persen, serta narasi delegitimasi yang melingkupi otoritas dan kebijakan pemerintah daerah. Temuan ini menunjukkan bahwa Kompas.com tidak semata-mata melaporkan realitas apa adanya, melainkan secara aktif memberikan warna evaluatif negatif yang konsisten pada setiap aspek perkembangan isu mulai dari proses perumusan kebijakan, respons pemerintah terhadap tekanan publik, hingga dinamika sosial yang melingkupi konflik tersebut. Kondisi demikian selaras dengan kerangka *Attribute Agenda Setting*, di mana atribut afektif yang melekat secara konsisten pada pemberitaan turut membentuk cara khalayak memaknai suatu kebijakan publik.

Kedua, dari sisi intensitas pemberitaan, hampir tiga perempat dari keseluruhan artikel berada pada kategori intensitas tinggi, dan tidak ditemukan satu pun artikel yang masuk dalam kategori intensitas rendah. Temuan ini memiliki makna yang signifikan dalam kerangka teori agenda setting: absennya intensitas rendah mengindikasikan bahwa Kompas.com secara konsisten memperlakukan setiap perkembangan isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati sebagai peristiwa yang penting, mendesak, dan tidak boleh diabaikan tanpa gradasi dan tanpa jeda. Kondisi tersebut mencerminkan apa yang dalam literatur agenda setting disebut sebagai *maintenance salience*, yakni pemeliharaan kementerian suatu isu secara berkelanjutan di ruang publik digital melalui intensitas pemberitaan yang tidak menurun sepanjang periode penelitian.

Ketiga, dari sisi kategori isu, pemberitaan terkonsentrasi secara dominan pada ranah politik dan demonstrasi. Dua kategori ini secara bersama-sama menyumbang hampir dua pertiga dari keseluruhan pemberitaan, sementara kategori-kategori lain yang secara substantif lebih dekat dengan kebijakan yang menjadi sumber persoalan seperti pajak sebagai isu substantif, hukum, dan sosial masing-masing hanya menempati proporsi yang sangat kecil. Bahkan kategori pajak sebagai isu substantif hanya muncul pada tiga artikel dari seluruh *corpus* yang dianalisis. Pola ini menunjukkan bahwa Kompas.com lebih menonjolkan dimensi konflik dan dramatisme sosial-politik ketimbang substansi kebijakan perpajakan itu sendiri. Kecenderungan ini mencerminkan logika *news value* yang memprioritaskan nilai berita konflik, keterlibatan *elite*, dan eskalasi aksi massa di atas kedalaman analitis dan penyajian substansi kebijakan yang memadai. Sementara itu, kategori rekonsiliasi yang merepresentasikan dimensi penyelesaian konflik turut mendapat porsi yang sangat kecil menandakan bahwa upaya konstruktif yang terjadi di lapangan, termasuk pembatalan kenaikan NJOP oleh Bupati Sudewo pada Desember 2025, tidak mendapat perhatian pemberitaan yang proporsional dibanding fase eskalasi yang mendahuluinya.

Keempat, dari sisi komposisi narasumber, kelompok aliansi massa menempati posisi paling dominan sebagai narasumber yang paling banyak dikutip, diikuti oleh DPRD dan kepolisian. Ketiga kelompok ini secara bersama-sama menguasai hampir dua pertiga dari seluruh narasumber yang dikutip mencerminkan bahwa Kompas.com secara struktural memberikan akses suara yang jauh lebih besar kepada aktor-aktor yang berada dalam relasi konflik langsung. Di sisi yang berlawanan, narasumber berbasis keahlian seperti akademisi dan Komnas HAM masing-masing hanya hadir dalam dua artikel, sedangkan tim hukum dan tim cek fakta masing-masing hanya muncul satu kali. Komposisi narasumber ini tidak hanya mencerminkan pilihan editorial, tetapi juga merupakan ekspresi dari *symbolic power imbalance* dalam ruang pemberitaan: suara

yang paling dramatis dan paling mudah diakses mendominasi narasi, sementara suara yang paling berpotensi memberikan konteks analitis dan penjelasan berbasis bukti justru paling jarang muncul.

Secara keseluruhan, keempat temuan tersebut membentuk satu pola yang saling mengunci dan saling memperkuat: sentimen negatif yang mendominasi pemberitaan ditopang oleh intensitas tinggi yang terus-menerus, dikonfirmasi oleh konsentrasi isu pada konflik politik dan demonstrasi, serta dimungkinkan oleh konfigurasi narasumber yang didominasi oleh kelompok-kelompok yang secara *inherent* berorientasi konfliktual. Kesamaan proporsi yang muncul di keempat variable yang masing-masing secara konsisten bergerak di kisaran angka yang serupa mengindikasikan bahwa ini bukan sekadar kumpulan temuan yang berdiri sendiri, melainkan produk dari satu logika produksi berita yang bekerja secara sistemik. Dalam perspektif *Attribute Agenda Setting*, Kompas.com tidak hanya menentukan isu apa yang penting, tetapi juga secara aktif membentuk atribut-atribut yang diasosiasikan khalayak dengan isu kenaikan pajak di Kabupaten Pati: bahwa isu ini negatif, gawat, berwujud konflik, dan disuarakan oleh mereka yang paling berseteru bukan oleh mereka yang paling memahami substansinya.

## 4.2 Saran

Berdasarkan temuan penelitian yang telah diuraikan, saran disampaikan kepada tiga pihak yang relevan sebagai berikut.

### 4.2.1. Bagi Redaksi Kompas.com dan Praktisi Media

Dominasi sentimen negatif yang mencapai hampir dua pertiga dari keseluruhan pemberitaan, dikombinasikan dengan konsentrasi isu pada ranah konflik politik dan demonstrasi serta minimalnya kehadiran narasumber berbasis keahlian, mengindikasikan perlunya evaluasi yang serius terhadap standar editorial dalam meliput isu kebijakan publik di tingkat daerah.

Evaluasi ini tidak semata-mata menyangkut persoalan *tone* atau gaya penulisan, melainkan menyentuh pertanyaan yang lebih mendasar: apakah proporsi sentimen dan pilihan sudut pandang yang ada saat ini benar-benar mencerminkan realitas yang berimbang, ataukah lebih merupakan produk dari rutinitas produksi berita yang merespons tekanan platform digital untuk mengutamakan konten dengan engagement tinggi?

Redaksi disarankan untuk secara aktif menyeimbangkan pemberitaan dengan mengalokasikan ruang yang lebih proporsional bagi pemberitaan yang menyentuh substansi kebijakan, konteks hukum yang melatarbelakanginya, dan narasi rekonsiliasi atau penyelesaian. Dalam konteks penelitian ini, fakta bahwa hanya tiga artikel dari keseluruhan *corpus* yang secara substantif membahas regulasi perpajakan sementara konflik dan *dramatisme* mendominasi merupakan sinyal yang perlu ditanggapi secara struktural oleh tim redaksi. Pemberitaan yang secara aktif menjelaskan substansi kebijakan kepada khalayak bukan hanya akan meningkatkan kualitas informasi yang diterima publik, tetapi juga akan memperkuat fungsi deliberatif media dalam sistem demokrasi.

Di samping itu, diversifikasi narasumber merupakan prioritas yang tidak dapat ditunda. Ketidakhadiran yang hampir absolut dari akademisi, pakar kebijakan fiskal, dan lembaga independen dalam pemberitaan menyebabkan khalayak kehilangan akses terhadap perspektif yang paling mampu menyediakan analisis berbasis bukti. Redaksi disarankan untuk mengembangkan praktik jurnalisme yang secara proaktif menjangkau narasumber ahli bukan hanya mereka yang paling dramatis atau paling mudah diakses sehingga pemberitaan yang dihasilkan tidak hanya kaya secara naratif, tetapi juga kaya secara substantif dan informatif bagi pembentukan pemahaman publik yang rasional dan konstruktif.

#### 4.2.2. Bagi Pemerintah Kabupaten Pati

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa konstruksi pemberitaan media nasional terhadap kebijakan kenaikan pajak di Kabupaten Pati dikuasai oleh narasi negatif dengan intensitas tinggi sepanjang periode Agustus hingga Desember 2025. Kondisi tersebut mencerminkan, antara lain, bahwa komunikasi kebijakan publik yang dilakukan oleh pemerintah daerah tidak cukup kuat untuk mengimbangi arus narasi negatif yang secara konsisten diproduksi media. Sebagaimana ditunjukkan oleh minimnya narasumber dari unsur pemerintah daerah yang hadir dalam *corpus* pemberitaan secara proporsional, pihak pemerintah tampak kurang mampu menjangkau media secara efektif dengan pesan yang terstruktur, berbasis data, dan mudah dipahami publik.

Pemerintah Kabupaten Pati disarankan untuk memperkuat kapasitas komunikasi kebijakan publik, terutama pada tahap awal perumusan dan implementasi kebijakan yang berpotensi memiliki dampak sosial-ekonomi yang luas. Komunikasi yang proaktif, transparan, dan berbasis data factual termasuk penjelasan yang komprehensif mengenai dasar hukum penetapan NJOP, kalkulasi dampak terhadap berbagai segmen masyarakat, dan mekanisme pengaduan atau keberatan yang tersedia perlu disampaikan kepada media sebelum isu berkembang menjadi resistensi sosial yang masif. Pengalaman dari dinamika isu pajak Pati menunjukkan dengan jelas bahwa ketika informasi kebijakan tidak dikomunikasikan secara memadai sejak awal, ruang informasi yang kosong cenderung diisi oleh narasi-narasi yang bersumber dari pihak-pihak yang menentang kebijakan, sehingga membentuk persepsi negatif yang sulit dikoreksi setelah mengendap di benak publik.

Lebih dari itu, pemerintah daerah juga perlu mengembangkan mekanisme respons komunikasi yang responsif dan adaptif terhadap eskalasi isu di ruang digital. Ketika media nasional arus utama seperti Kompas.com mulai memberitakan suatu kebijakan daerah dengan

intensitas tinggi, kapasitas pemerintah untuk hadir sebagai narasumber yang kredibel, kooperatif, dan informatif dalam pemberitaan tersebut menjadi faktor yang sangat menentukan arah konstruksi narasi media ke depannya. Strategi komunikasi yang berbasis pemantauan media secara *real time* dan didukung oleh kemampuan untuk menyusun pernyataan resmi yang tepat sasaran akan sangat membantu pemerintah dalam mengelola persepsi publik secara lebih efektif dalam situasi krisis komunikasi kebijakan.

#### **4.2.3. Bagi Peneliti Selanjutnya**

Penelitian ini memiliki sejumlah keterbatasan yang perlu menjadi acuan bagi pengembangan kajian di masa mendatang. Pertama, penelitian ini hanya berfokus pada satu media, yaitu Kompas.com, dalam satu periode waktu tertentu. Dengan demikian, temuan yang dihasilkan belum dapat merepresentasikan keseluruhan ekosistem pemberitaan isu pajak daerah secara luas, dan tidak memungkinkan adanya perbandingan antarmedia yang dapat mengungkap perbedaan kecenderungan konstruksi pemberitaan. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas objek kajian dengan melibatkan beberapa media online nasional secara komparatif misalnya Tempo.co, Detik.com, atau Tribunnews.com guna melihat apakah pola yang ditemukan dalam penelitian ini bersifat unik pada Kompas.com atau merupakan kecenderungan yang lebih *general* dalam ekosistem media digital nasional.

Kedua, pendekatan analisis isi kuantitatif yang digunakan dalam penelitian ini efektif dalam memetakan distribusi dan frekuensi pola pemberitaan secara sistematis, namun memiliki keterbatasan dalam menangkap nuansa makna yang lebih dalam yang terkandung dalam teks berita. Penelitian selanjutnya dapat memperkuat dimensi interpretatif ini dengan mengombinasikan metode kuantitatif yang telah digunakan dengan pendekatan kualitatif, seperti analisis wacana kritis (*critical discourse analysis*) atau analisis *framing*, guna menggali secara

lebih mendalam bagaimana realitas kebijakan fiskal daerah dikonstruksi, dimaknai, dan disampaikan kepada khalayak melalui mekanisme tekstual yang lebih kompleks.

Ketiga, penelitian ini tidak menganalisis efek dari pola pemberitaan yang teridentifikasi terhadap persepsi dan respons khalayak. Dengan kata lain, pertanyaan tentang bagaimana khalayak menerima, memaknai, dan merespons konstruksi pemberitaan yang didominasi sentimen negatif dan intensitas tinggi tersebut belum terjawab dalam lingkup penelitian ini. Penelitian selanjutnya dapat mengembangkan desain penelitian yang mengintegrasikan analisis isi dengan survei khalayak atau eksperimen, sehingga memungkinkan pengujian langsung atas pengaruh atribut pemberitaan seperti yang telah dipetakan dalam penelitian ini terhadap pembentukan persepsi, sikap, dan perilaku publik dalam kaitannya dengan isu kebijakan fiskal daerah.

Keempat, penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan untuk mengembangkan kerangka analisis yang lebih sensitif terhadap dimensi temporal, yakni dengan menelaah apakah dan bagaimana pola sentimen, intensitas, kategori isu, dan komposisi narasumber mengalami perubahan yang signifikan antar fase perkembangan isu dari fase kemunculan, eskalasi, puncak ketegangan, hingga resolusi. Pendekatan longitudinal semacam ini akan memberikan gambaran yang lebih dinamis dan bernuansa tentang bagaimana media merespons perkembangan suatu isu kebijakan dari waktu ke waktu, yang pada gilirannya akan memperkaya pemahaman teoritis tentang mekanisme kerja agenda setting dalam konteks isu kebijakan fiskal daerah di Indonesia.